

PEMANFAATAN APLIKASI SRIKANDI DALAM PENGELOLAAN ARSIP PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Faiz Aura Diva Santoso¹, Endah Sulistyorini², Erlina Rahma Wati³, Anang Sugeng Cahyono⁴, Dwi Ima Herminingsih⁵

Universitas Tulungagung^{1,2,3,4,5}

¹faizaura29@gmail.com, ²endahsulistyorini1504@gmail.com, ³diani4780@gmail.com,

⁴akusukambahdi@gmail.com, ⁵dwima.hermin@gmail.com

Received: 21-12-2024

Revised: 22-02-2025

Approved: 10-03-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan Aplikasi Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dalam pengelolaan kearsipan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung berdasarkan model e-government Layne & Lee (2001). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan wawancara. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sedangkan data sekunder berasal dari dokumentasi, buku, jurnal, dan situs web. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Aplikasi SRIKANDI telah memenuhi indikator model e-government Layne & Lee. Pada indikator catalogue, aplikasi ini memfasilitasi pengelolaan surat menyurat secara digital. Pada indikator transaction, Aplikasi SRIKANDI mendukung pertukaran informasi antarinstansi dengan fitur persuratan dan pengarsipan elektronik. Indikator vertical integration terlihat dari integrasi sistem antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), memungkinkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan arsip. Namun, pada indikator horizontal integration, aplikasi ini belum sepenuhnya mengakomodasi integrasi lintas instansi di luar pemerintah karena berbasis Government to Government (G2G). Simpulan, Aplikasi SRIKANDI telah membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal keterbatasan integrasi horizontal dan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang kearsipan.

Kata Kunci: Aplikasi Srikandi, Pengelolaan Arsip, E-Government, Digitalisasi Kearsipan

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital saat ini telah berkembang pesat, dimana telah membawa perubahan terhadap perkembangan sosial di masyarakat. Dampak positif yang telah dirasakan dengan adanya perkembangan tersebut adanya kemudahan mendapatkan informasi serta terciptanya kesejahteraan masyarakat. (Kartiana et al., 2024) Penerapan teknologi ini dalam pemerintahan dikenal sebagai *electronic government* atau *e-government*. Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang membahas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Elektronik, 2018). SPBE pada hakekatnya merupakan *e-government* bila ditinjau dari isi Peraturan Presiden, yaitu "Pelaksanaan tata kelola pemerintah yang menyediakan fasilitas terhadap penerapan SPBE menggunakan teknologi informasi dan komunikasi." (Rusdy & Flambonita, 2023). *E-government* adalah pemanfaatan aplikasi yang, terutama melalui aplikasi yang berbasis *website* dan internet digunakan memperluas jangkauan serta meningkatkan kualitas layanan publik. Tujuan utamanya mencakup memberikan kemudahan bagi warga negara, mitra bisnis, pegawai pemerintah, serta berbagai lembaga pemerintahan dalam berinteraksi dengan pemerintah secara lebih efektif, efisien, dan transparan. (Sriyati et al., 2015). Didalam peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 yang dikeluarkan

oleh Arsip Nasional Republik Indonesia mengatur pedoman Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan dinamis) adalah aplikasi umum dibidang kearsipan. (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2021).

Implementasi aplikasi serta pelaksanaan teknologi didalam administrasi publik dinyatakan sebagai penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk merancang ulang informasi dan komunikasi serta integritas transaksi antara pemerintah dengan masyarakat, perusahaan, dan organisasi non pemerintah serta antara organisasi yang berbeda dengan instansi pemerintah untuk menggapai tujuan tertentu. Tujuannya adalah peningkatan akses pemerintah. (Cahyono et al., 2022). Dengan adanya *e-government*, kualitas pelayanan publik dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat (Purnamaningsih, 2024). Pemerintah mengatur penggunaan *e-government* sebagai landasan kerja unsur organisasi perangkat pemerintah. Sebagaimana telah dicetuskan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 diseluruh jajaran pemerintahan (Data & Dan, 2006). Pengelolaan *e-government* juga menghadapi tantangan dalam menghadapi integrasi sistem dan koordinasi antar berbagai instansi. Ketidakmampuan untuk mengintegrasikan berbagai sistem pada *platform e-government* tidak hanya dapat menghambat efisiensi dan efektivitas layanan publik, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penerapan teknologi dalam pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya koordinasi yang lebih baik antar instansi untuk memastikan terciptanya sistem yang terintegrasi dan berfungsi optimal. Berbagai perbedaan infrastruktur, kondisi geografis, ekonomi dan sumberdaya manusia di Indonesia, menjadi beberapa faktor kegagalan *e-government* (Cahyono et al., 2024).

Pada umumnya, permasalahan dalam pengelolaan arsip masih bersifat manual, penggunaan kertas yang tidak efisien, kesulitan dalam pencarian dan akses arsip. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip, pemanfaatan teknologi informasi menjadi sangat penting dengan cara menerapkan *e-government*. Selain itu, sistem *e-government* tidak hanya berfungsi untuk membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakat (*Government to Citizens*), tetapi juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah dengan pemerintah lain (*G2G*), pemerintah dengan dunia bisnis (*G2B*), dan pemerintah dengan pegawai atau karyawannya (*G2E*). (Lestari & Ramadhanti, 2024). Model yang dibuat oleh Layne & Lee (2001) dalam (Abdullah, 2017) berfungsi untuk membantu administrator publik mengkaji tentang *e-government* dan organisasi. Model Layne & Lee merupakan model yang menerapkan studi analisis dalam tingkatan *e-government* yang memuat 4 tingkatan, yaitu : 1) *Catalogue* atau Katalog, 2) *Transaction* atau Transaksi, 3) *Vertikal Integration*, dan yang terakhir 4) *Horizontal Integration*. (Irawan & Hidayat, 2012).

Salah satu penerapan *e-government* dalam lembaga pemerintahan adalah dalam sistem pengelolaan arsip. Pengelolaan arsip memudahkan dalam proses pencarian kembali jika arsip diperlukan apabila secara otomatis, terstruktur. Pada dasarnya arsip dapat berupa gambaran sesuai dengan teknologi maupun komunikasi. Telah ditetapkan oleh pemerintah berbagai aplikasi umum SPBE salah satunya yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). *Software* ini diakses dalam *playstore* maupun dari *website* <https://srikandi.arsip.go.id/> . Sejak tahun 2022 Pemerintah Daerah utamanya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung telah menggunakan Aplikasi SRIKANDI. KemenpanRB, ANRI, KOMINFO, dan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) merupakan Badan yang menaungi Aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. (Desa et al., 2023). SRIKANDI adalah suatu inovasi

berbasis aplikasi yang diterapkan oleh pemerintah yang diterapkan di pusat maupun daerah. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur-fitur seperti pengelolaan naskah surat, tanda tangan digital, sehingga mempercepat dan lebih sederhana pada langkah administrasi persuratan. Selain itu kemampuan akses yang fleksibel, Aplikasi SRIKANDI memungkinkan pengguna untuk bekerja tanpa terikat oleh waktu dan lokasi, mendukung efisiensi kerja dalam era digital.(Adra & Permana, 2023). Dasar Hukum penerapan Aplikasi SRIKANDI yaitu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang membahas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selain itu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan ASN dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 tahun 2020 yang membahas Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis.(Noor et al., 2023). Pemerintah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kinerja di bidang kearsipan melalui penerapan Aplikasi Srikandi. Aplikasi dirancang untuk memastikan arsip tetap kredibel, menyeluruh, dan terpercaya.

Selain itu, pemakaian Aplikasi Srikandi bermaksud mendukung administrasi pemerintah yang lebih terstruktur, sehingga berbagai aktivitas dalam pemerintah dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. (Juniati & Nurdiansyah, 2023). Manfaat dan tujuan dari adanya Aplikasi SRIKANDI antara lain adalah pengurangan penggunaan kertas, fitur tanda tangan elektronik sehingga tidak harus menunggu atasan di kantor untuk menandatangani dokumen/ surat yang ingin di kirim, mengklasifikasi jenis arsip yang bersifat permanen atau musnah, dan jenis akses arsipnya terbuka atau tertutup, dan lain-lain. Arsip surat menyurat tersusun secara rapi dan mudah ditemukan, pemberkasan dan pengelolaan arsip berdasarkan sisi waktu, tenaga dan biaya dapat terstruktur secara efektif dan efisien(Ilmu et al., 2024). Pemanfaatan Aplikasi SRIKANDI masih mengalami hambatan seperti masalah jaringan yang masih tersendat, belum adanya fitur notifikasi, server KOMINFO pusat ataupun operator BSre yang seringkali mendapatkan kendala dalam penggunaan tanda tangan elektronik pada pembuatan surat, maka KOMINFO pusat dan BSre menerapkan pemeliharaan pada sistem tersebut. Dengan demikian Aplikasi SRIKANDI masih memerlukan penyempurnaan. (Millenia & RFS, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menggabungkan sumber literatur kepustakaan baik primer maupun sekunder . (Del Cid et al., 2009). Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan 4 indikator yaitu *catalogue, transaction, vertical integration dan horizontal intergation*. Sumber data primer berupa wawancara dengan pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sedangkan sumber data sekunder berupa dokumentasi dari sumber yang tersedia seperti *website*, buku maupun jurnal. Pemilihan metode dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian yang ingin mengkaji dan menggambarkan atau mendeskripsikan Pemanfaatan Aplikasi SRIKANDI dalam Pengelolaan Kearsipan di Kabupaten Tulungagung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

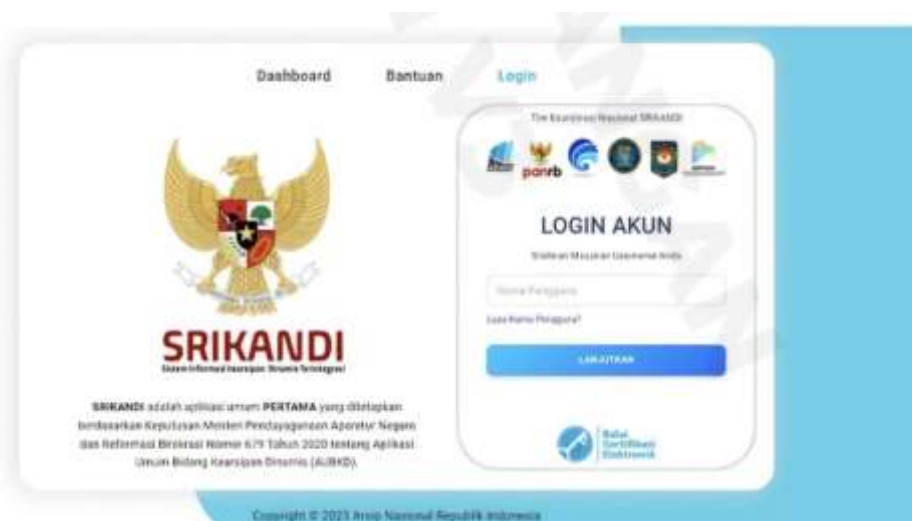
Pemanfaatan Aplikasi SRIKANDI Terhadap Model *E-Government* Laynee & Lee (2001) Permasalahan dalam pengelolaan arsip sebelumnya pada umumnya masih bersifat manual. Kurangnya perhatian terhadap arsip dalam hal pemeliharaan dan pengamanan arsip serta sistem pemberkasan, menimbulkan berkas arsip sulit dicari apabila suatu saat dibutuhkan. Permasalahan berkas arsip akan terus beradaptasi

sejalan dengan pertumbuhan instansi yang berkaitan. Penambahan arsip yang berkelanjutan tanpa dukungan oleh prosedur kerja yang tepat, serta kurangnya peralatan dan fasilitas kearsipan yang memadai bersama dengan kurangnya ahli profesional di sektor kearsipan, dapat mengakibatkan timbulnya kendala. Atas dasar penjelasan diatas, kendala di sektor arsip, dapat diuraikan dengan lebih spesifik sebagai berikut: kesulitan dalam pencarian dan akses arsip, kurangnya profesionalisme petugas kearsipan, kekurangan jumlah sumber daya manusia atau SDM yang memadai serta berpengalaman di sektor kearsipan, kurangnya kerjasama antara petugas kearsipan dengan pihak-pihak terkait di dalam organisasi, fasilitas pengelolaan arsip yang tidak memadai, serta kurangnya disiplin pegawai dalam pengelolaan arsip.

Dalam artikel ini kami menggunakan pendekatan tahapan *e-government* Layne & Lee (2001) yang memuat empat indikator :

1) *Catalogue* (Katalog)

Pada tahap katalogisasi, pemerintah negara berfokus membangun kehadiran layanan online bagi pemerintah. Pemanfaatan *Information Communication and Technology (ICT)* ditekankan dalam menjamin eksistensi pemerintah secara daring atau online. Pada tahap ini terlihat seperti proses pembuatan katalog, karena pemerintah menyediakan informasi kepada publik secara daring atau online melalui situs .(Irawan & Hidayat, 2012). Aplikasi SRIKANDI merupakan terobosan baru yang dipublikasikan oleh Pemerintah untuk memfasilitasi manajemen arsip dan administrasi pemerintahan secara elektronik. Aplikasi SRIKANDI berbasis *website* sudah diterapkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2022. *Website* ini sudah beberapa kali mengalami pembaharuan, baik dari segi desain maupun elemen di dalamnya. Adanya *website* ini sangat memberi kemudahan bagi pegawai dalam mengelola surat menyurat. Dapat disimpulkan bahwa wawancara yang telah dilakukan menghasilkan sebagai berikut: bahwa fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi SRIKANDI adalah sebagai berikut antara lain mengelola surat menyurat, baik surat keluar maupun surat masuk. Dalam Pengaplikasian SRIKANDI sudah terdapat fitur-fitur serta berbagai jenis surat seperti surat keputusan, surat kerjasama, nota dinas, pengumuman, kontrak kerja, dan sebagainya. Fiturnya antara lain kop surat, lambang daerah, tandatangan elektronik, dan lain-lain. Berikut tampilan mengenai Aplikasi SRIKANDI :



Gambar 1. Tampilan Form log in Aplikasi SRIKANDI
Sumber : (<https://s.id/unitkearsipanv3>)



Gambar 2. Instrumen Kearsipan
Sumber : (<https://s.id/unitkearsipanv3>)

2) *Transaction* (Transaksi)

Pada indikator transaksi menurut Layne & Lee yang dimaksud dengan transaksi adalah dalam bentuk pertukaran informasi. Aplikasi SRIKANDI merupakan kerjasama antara beberapa instansi pemerintahan seperti ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau KemPANRB. ANRI bertugas melakukan bimbingan teknis (bimtek) serta melakukan sosialisasi terkait Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) guna meningkatkan dan mengembangkan aplikasi ini. Kementerian KOMINFO memiliki tanggungjawab untuk melakukan operasionalisasi, pemeliharaan, dan pengembangan aplikasi agar selalu berjalan dengan baik dan terus berkembang sesuai kebutuhan pemerintah. Kemudian BSSN bertanggungjawab atas audit keamanan untuk memberikan perlindungan terhadap ancaman kejahatan siber. Selain itu, KemenPANRB berperan dalam mendorong implementasi sistem kearsipan berbasis elektronik, serta memastikan bahwa setiap instansi pemerintah menggunakan Aplikasi SRIKANDI secara optimal.

Dalam Aplikasi SRIKANDI transaksi dilakukan dengan bentuk transaksi informasi. Melalui fitur-fitur yang mendukung persuratan dan pengelolaan arsip dalam Aplikasi SRIKANDI dapat memfasilitasi kolaborasi antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung dengan perangkat daerah yang sudah menggunakan Aplikasi SRIKANDI. Penyusunan surat maupun naskah dinas, pengiriman dan penerimaan dokumen resmi antar perangkat daerah atau lembaga dapat dilakukan dengan mudah dan kapan saja tergantung kebutuhan dan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi. Dengan sekali klik surat atau naskah dinas akan terkirim kepada instansi yang kita tuju tanpa membuang waktu dan tenaga untuk pergi ke tempat instansi berada. Maka proses transaksi yang dilaksanakan oleh DinPerpusSip Kabupaten Tulungagung dengan Instansi Pemerintah Pusat sudah berjalan dengan baik.



The screenshot shows the 'Daftar Berkas Aktif' (Active Dossier List) in the SRIKANDI application. It features a search bar at the top with filters for 'Unit Layanan Arsip', 'Pilih Tanggal Mulai', 'Pilih Tanggal Selesai', 'Pilih Status Berkas', and 'Pilih Instansi'. Below the search bar is a table with columns for 'No', 'No Berkas / Nomor Berkas', 'Nama', 'Masa Berlaku', 'Jumlah Berkas', and 'Aksi'. Two rows are visible in the table:

No	No Berkas / Nomor Berkas	Nama	Masa Berlaku	Jumlah Berkas	Aksi
1	46.20.02.1	Pengembangan Indeks Daerah	3 Maret 2024 s.d 7 Maret 2024	2	[Icons]
2	46.20.12	Teknologi Informasi	3 Maret 2024 s.d 8 Maret 2024	1	[Icons]

Gambar 3. Pemberkasan Arsip
Sumber : (<https://s.id/unitkearsipanv3>)

3) *Vertical Integration*

Pada indikator integrasi vertikal telah terintegrasi yang mendalam antar instansi, yaitu secara vertikal. Organisasi yang bersifat vertikal namun mempunyai fungsi yang sama bergabung dalam satu layanan. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat dibuktikan bahwa pengiriman berkas arsip yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung kepada Pemerintah Pusat sudah dilakukan relatif baik. Hal ini diindikasikan dengan proses pengiriman arsip ke ANRI menggunakan aplikasi SRIKANDI dimulai ketika naskah dinas yang telah ditandatangani secara elektronik dikirim melalui SRIKANDI. Aplikasi SRIKANDI mencatat setiap status pengiriman, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan arsip. Setelah naskah diterima oleh ANRI, arsip tersebut disimpan dan dikelola dengan cermat untuk menjaga integritas dan ketersediaan aksesnya. Kemudian apabila terjadi masalah atau kendala maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat bertukar informasi tentang kendalanya melalui whatsapp serta *Helpdesk* Aplikasi SRIKANDI yang kemudian akan diproses oleh Arsip Nasional Republik Indonesia yang dapat dibuka pada website <https://layanan.arsip.go.id/>

4) *Horizontal Integration*

Pada indikator *Horizontal Integration e-government* sudah menjadi pelayanan terpadu bagi masyarakat. (Rahman, 2008) serta berperan sebagai pelayanan satu pintu bagi masyarakat umum. Aplikasi SRIKANDI hanya dapat diakses Instansi pemerintah yang telah terdaftar pada Aplikasi SRIKANDI. Di Tulungagung sendiri Aplikasi Srikandi sudah dapat diakses pada 12 Instansi Pemerintah dalam korespondensi surat secara digital yakni Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Kecamatan Ngantru dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Tulungagung. Masyarakat dan Instansi Pemerintah lain yang belum terdaftar pada Aplikasi SRIKANDI tidak dapat mengakses Aplikasi SRIKANDI. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi Integrasi Horizontal pada Aplikasi SRIKANDI karena Aplikasi SRIKANDI ini

berbasis *Government to Government (G2G)* yang penyampaian informasinya melalui dua arah dari pemerintah dan pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa Aplikasi Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) yang diterapkan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat diketahui melalui indikator model Layne & Lee (2001). Pada indikator *catalogue* dibuktikan dengan sudah adanya fitur yang dimanfaatkan untuk mengatur administrasi surat menyurat, baik surat keluar maupun surat masuk, kop pada surat, lambang daerah, tandatangan elektronik, dan lain-lain. Pada indikator *transaction*, telah terjadi pertukaran informasi berupa komunikasi yaitu melalui fitur-fitur yang mendukung persuratan dan pengelolaan arsip dalam Aplikasi SRIKANDI dapat memfasilitasi kolaborasi antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung dengan perangkat daerah yang sudah menggunakan Aplikasi SRIKANDI. Pada indikator *vertical integration*, Aplikasi SRIKANDI menghubungkan sistem tingkat bawah dengan sistem yang lebih tinggi sehingga meminimalkan waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam sistem kearsipan dan memastikan aliran informasi yang efisien dan akurat diseluruh unit kerja pemerintah. Pada indikator *horizontal integration*, dapat disimpulkan bahwa Aplikasi SRIKANDI tidak dapat diakses oleh masyarakat maupun instansi pemerintah yang tidak terdaftar pada aplikasi SRIKANDI.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2017). Akreditasi Kemristekdikti Nomor 51/E/Kpt/2017. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer (Jtiik)*, 4, 297–303.
- Adra, A., & Permana, I. (2023). Pemanfaatan Aplikasi Srikandi Bagi Pegawai Di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 11(01), 1–12.
<https://doi.org/10.31629/juan.v11i01.5807>
- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2021). Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. *Arsip Nasional Republik Indonesia*, 7(2), 107–115.
- Cahyono, A. S., Sarahfina, M., & Destaru, B. (2024). *Pengelolaan Dan Pemanfaatan Website Sistem Pelayanan Administrasi (SILASTRI) Pada Pemerintah Desa Mirigambar Management and Utilization of the Administrative Service System Website (SILASTRI) at the Mirigambar Village Government*. 7(8), 3088–3094.
<https://doi.org/10.56338/jks.v7i8.5994>
- Cahyono, A. S., Zauhar, S., & Domai, T. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Pada Pengadilan Agama Kelas I A Tulungagung E-Government-Based Public Service Innovation in Class I A Tulungagung Religious Court. *Publiciana*, 15(02), 82–97.
<https://doi.org/10.36563/p%0Ahttps://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/644%0Ahttps://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/download/644/477>
- Data, B., & Dan, P. (2006). Basis data peraturan dan perundang-undangan (INPRES 2003). *Program*, 3, 1–14.
- Del Cid, P. J., Hughes, D., Ueyama, J., Michiels, S., & Joosen, W. (2009). DARMA: Adaptable service and resource management for wireless sensor networks. *MidSens'09* -

- International Workshop on Middleware Tools, Services and Run-Time Support for Sensor Networks, Co-Located with the 10th ACM/IFIP/USENIX International Middleware Conference*, 1–6. <https://doi.org/10.1145/1658192.1658193>
- Desa, K., Daerah, P., & Transmigrasi, T. D. A. N. (2023). *Efektivitas Aplikasi Srikandi Dalam Penciptaan Surat Di Lingkungan Inspektorat Jenderal , Surat Di Lingkungan Inspektorat Jenderal ,.*
- Elektronik, P. B. (2018). *Perpres 95 SPBE*. 182.
- Ilmu, F., Dan, S., Pemerintahan, I., Ar-raniry, U. I. N., & Aceh, B. (2024). *Penerapan Aplikasi Srikandi Pada Biro.*
- Irawan, B., & Hidayat, M. N. (2012). *E-Govermnet, Konsep, Esensi, Dan Studi Kasus.*
- Juniati, J., & Nurdiansyah, A. (2023). Pola Pengelolaan Arsip Secara Digital dalam Mendukung Efektivitas Organisasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang. *IKOMIK: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Informasi*, 3(1), 28–37. <https://doi.org/10.33830/ikomik.v3i1.5448>
- Kartiana, R. F., Indrahti, S., Studi, P., Fakultas, K., Sosial, I., Dinamis, P. A., & Srikandi, A. (2024). *Pemanfaatan Aplikasi Srikandi terhadap Pengelolaan Arsip Dinamis dalam rangka Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan*. 5(2), 436–447.
- Lestari, D. P., & Ramadhanti, D. (2024). *Analisa E-Government dalam Penggunaan Aplikasi Srikandi pada Dinas Pariwisata Kota Palembang*. 1–10.
- Millenia, & RFS, H. T. (2023). Efektivitas Pelayanan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru Millenia 1 , Harapan Tua RFS 2. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2023(15), 403–408.
- Noor, A. S. S. P., Damayanti, F., & Garnida, A. (2023). Aplikasi Srikandi dalam Meningkatkan Komunikasi Tertulis di Kantor Perwakilan BKKBN Jawa Barat. *Manajemen Dan Sistem Informasi*, 22(2), 216–226.
- Purnamaningsih, P. E. (2024). Electronic Government Melalui Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi): Studi Kasus Kpu Provinsi Bali. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 1(3), 136–141. <https://doi.org/10.61292/shkr.127>
- Rahman, A. (2008). Arief Rahman Abstract Abstrak. *Ja Ai*, 15 no 2(2), 190–203. <https://journal.uui.ac.id/JAAI/article/view/3751>
- Rusdy, R. M. I. R., & Flambonita, S. (2023). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Di Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance. *Lex LATA*, 5(2), 218–239. <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2351>
- Sriyati, Satria, F., & Sudewi. (2015). Pemanfaatan E-Government sebagai Media Promosi di Bidang Pariwisata Ekonomi Kreatif (Studi Kasus : Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kabupaten Pesawaran). *Jurnal TAM Technology Acceptance Model*, 5, 80–87. [10.56327/jurnaltam.v5i0.52](https://doi.org/10.56327/jurnaltam.v5i0.52)